

**EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
MELALUI SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH
(STUDI PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG 2019)**

Anggi Safitri¹, Adji Suradji Muhammad², Yudhanto Satyagraha Adiputra³
anggisafitri436@gmail.com
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The Legislative General Election was held simultaneously in 2019. Of course, these activities do not just happen but through processes and cooperation between related institutions including the General Election Commission in the regions. Through this research, the researcher wants to evaluate the performance that has been done by the KPU of Tanjungpinang City as an independent institution that organizes elections in conducting political outreach to the public so that it can increase voter participation. The research method used is descriptive method and uses a qualitative approach through data acquisition by observation, interviews and secondary data collection in the form of books, organizational structures, and some other literature related to this research. From the results of the research shows that the implementation of the performance of the KPU Tanjungpinang City in socializing to the community has been done well and received good responses from the community. However, in achieving the level of voter participation, the Election Commission of Tanjungpinang City has not met the national target.

Keywords: Performance Evaluation, General Election, KPU, Participation, Political Socialization.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

KPU Kota Tanjungpinang sebagai lembaga negara yang berada di daerah telah melaksanakan Pemilihan Umum secara serentak pada 17 April 2019, sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya dengan melaksanakan sosialisasi Politik dan Pendidikan Politik untuk mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan umum sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil yang sesuai dengan sprit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia (Petrus Gleko, Agung Suprojo, 2017).

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Politik, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan wujud dari proses bagaimana formulasi dan implementasi dijalankan namun pada tataran implementasi masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya terutama di Kota Tanjungpinang. Sosialisasi Politik menjadi tugas penting bagi KPU apalagi target KPU secara Nasional harus mencapai 77,5% seperti yang dituangkan dalam rencana strategis KPU Republik Indonesia untuk pemilu tahun 2019 (www.kpu.go.id). Namun, pada pemilihan umum Kota Tanjungpinang di tahun 2019 KPU Kota Tanjungpinang belum mencapai target sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

Tabel 1. Partisipasi Pemilih Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 2019

NO	TAHUN	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PARTISIPASI	TARGET KPU
1	2014	150.666	102023	68%	Belum Menggunakan Target
2	2019	151.072	116999	76,09 %	77,5

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang (data diolah 2020)

Pada table di atas menjelaskan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun, KPU Kota Tanjungpinang belum mencapai target 77,5% sebagaimana yang telah ditetapkan. yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat pada tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat, yang memerlukan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan oleh karenanya partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.

Sejauh ini KPU Kota Tanjungpinang sudah melakukan kegiatan dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi politik ke berbagai segmen masyarakat bersama dengan relawan demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Kota Tanjungpinang namun tetap saja partisipasi politik pada pemilihan umum anggota DPRD kota tanjungpinang belum mencapai target.

Selain itu, jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana di tahun 2014 sebanyak 150.666 jiwa dan di tahun 2019 sebanyak 160.314 dari jumlah pemilih yang terus bertambah seharusnya diharapkan dapat meningkatkan

partisipasi yang menggunakan hak pilihnya namun yang terjadi partisipasi pemilih pada pemilihan anggota DPRD Kota Tanjungpinang belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

Dari hal tersebut perlu untuk di evaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam hal peningkatan partisipasi pemilih melalui sosialisasi politik terkait kepemiluan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai peserta yang akan berpartisipasi pada pemilihan umum, sehingga diharapkan partisipasi pemilih pada pemilu yang akan datang dapat meningkat secara signifikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menimbulkan maka, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan anggota DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2019. dengan tujuan Untuk mengevaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pada pemilihan anggota DPRD Kota Tanjungpinang 2019. agar tercapainya tujuan tersebut, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat yaitu teoritis dan praktis.

II. Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, J. Lexy, 2006) Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan dekriptif yang bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal atau apa adanya.

Data yang di kumpulkan dalam penelitian Deskriptif biasanya berupa, kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang di kumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, atau catatan pribadi lainnya.

Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

Informen	Jumlah
Komisioner KPU Kota Tanjungpinang	1 orang
Komisioner BAWASLU Kota Tanjungpinang	1 orang
Jurnalis	1 orang
Masyarakat	6 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Melalui Sosialisasi Politik dalam meningkatkanPartisipasi Pemilih(Studi Pemilihan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang 2019 ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Tabel 4. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Perbedaan
1	Penelitian oleh Hadi Susanto	Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017”.	• Pada penelitian Hadi Susanto ini membahas tentang Evaluasi Tahapan Pemilihan Anggota PPS dan PPK.
2	Penelitian oleh Gabriela Aprilia Kolamban	Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018	• Pada penelitian ini fokus kepada Kinerja KPU dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Kepala Daerah.
3	Penelitian oleh Eko Ari Wibowo h	“ Penerapan Strategi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Di Kota Magelang	• Pada penelitian ini membahas mengenai Strategi Politik dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih.

Sumber: Data Olahan peneliti, 2020.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang di teliti oleh peneliti terhadap peneliti sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Evaluasi oleh William Dun dalam eko Handoyo (2012:135).

1. Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan Evalausi Kinerja KPU Melalui sosialisasi Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Williaam Dun dengan beberapa indicator dan temuan lapangan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektifitas kinerja yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang sudah bisa dikatakan efektif karena KPU Kota Tanjungpinang dalam melakukan tugasnya tidak terlepas dari visi dan misi. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi KPU dalam hal sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan menggalakkan pentingnya turut berpartisipasi dan menggunakan hak pilih pada saat pemilihan umum, menjalin kerjasama, mengoptimalkan sumber daya serta pelatihan dan pemberdayaan dalam hal peningkatan partisipasi pemilih yang bersih. Sejalan dengan visi dan misinya, KPU Kota Tanjungpinang sudah menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi dan misinya.

KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih tidak terlepas dari misinya yaitu meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan pelaksanaan sosialisasi politik juga menjadi tugas bagi KPU karena telah diatur dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada point ketiga yaitu Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

KPU Kota Tanjungpinang dalam melakukan sosialisasi politik dibantu dengan dengan TIM Relawan Demokrasi. Tim relawan demokrasi ini merupakan program dari pusat yang harus dijalankan oleh setiap KPU di daerah untuk membantuk tugas-tugas KPU dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. KPU Kota Tanjungpinang juga menyebutkan secara randem atau acak mereka sudah melakukan sosialisasi disetiap elemen masyarakat. Maksud atau acak randem ini adalah KPU tidak melakukan sosialisasi dari rumah kerumah melainkan mendatangi setiap segmen sesuai dengan Tim Relawan yang sudah dibentuk. Dari sini TIM Relawan yang berkerja untuk mengumpulkan masa sesuai dengan sasarannya seperti: Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Pemilih Perempuan, Tokoh Agama. dan lain-lain. Setelah itu KPU yang akan memberikan sosialisasi dan di bantu dengan TIM Relawan.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang perlu dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki dalam hal ini usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU melalui sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih, apa saja program-program yang dijalankan oleh KPU dan apakah kegiatan sosialisasi politik yang dilaksanakan KPU Kota Tanjungpinang memberikan dampak positif terhadap partisipasi pemilih pada pemilihan umum di tahun 2019. dari penelitian terdapat pelaksanaan yang efisien seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Go to school, Go to campus, Go class to class di setiap kampus Melakukan sosialisasi di media cetak, media sosial, melakukan sosialisasi berkejasama dengan RRI, dan juga rutin setiap senin pagi menjadi Pembina upacara di setiap sekolah SMA sampai juga melakukan kegiatan seni, dan juga paling penting KPU membuat TIM Relawan Demokrasi ada 11 segmen yaitu pemilih pemula, pemuda, perempuan, disabilitas, keagamaan, dll. yang dilakukan oleh KPU dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terutama pemilih pemula supaya pemilih pemula mejadi pemilih yang cerdas juga bersih.

3. Kecukupan

Untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang peneliti menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh Dun selanjutnya ialah kecukupan yakni berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. kecukupan kinerja yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang melalui sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih ini sangat berguna untuk masyarakat namun terkait dengan hambatan mengapa masyarakat masih belum menggunakan hak pilihnya peneliti menyimpulkan berbagai variasi di mulai dari tingkat kesadaran politik bagi masyarakat karena sosialisasi telah diberikan namun kesadaran juga diperlukan, ada juga di sebabkan oleh factor-faktor lain seperti cuaca yang pada saat pemilu hujan, masyarakat yang pekerjaannya tidak bisa di tinggal, dan juga ada terkait masyarakat yang tidak menerima formulir C 6 atau masyarakat sering menyebutkan formulir undangan sehingga masyarakat merasa ia tidak di undang untuk menyoblos.

4. Perataan

Pemerataan dapat dikatakan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh tepat sasaran, berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. pemerataan kinerja yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang melalui sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih ini sudah hampir

merata apalagi KPU dibantu oleh relawan demokrasi dimana relawan demokrasi ini merupakan program dari pusat yang harus dilaksanakan oleh KPU di setiap daerah. Relawan demokrasi ini terdiri dari 11 segmen ada pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas keagamaan, warganet atau netizen, dan relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini sebagai perpanjangan tangan KPU untuk membantu KPU dalam hal melaksanakan sosialisasi politik langsung kepada masyarakat.

5. Responsivitas

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) jika masih gagal maka belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya dari adanya kebijakan. Respon dari kinerja yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat mendapatkan respon yang cukup baik oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bawaslu setiap kegiatan yang dilakukan bertujuan baik sudah tentu mendapatkan respon yang baik namun sejauh mana pemahaman terhadap apa yang disampaikan juga perlu diuji.

6. Ketepatan

Ketepatan ini merujuk pada nilai atau harga dari tujuan yang ingin dicapai kriteria ini dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. dalam pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU menurut peneliti sudah dinilai tepat.

2. Hasil Pembahasan

Pelaksanaan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu. Keseluruhan tahapan pemilu ini tertuang dalam PKPU Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang secara resmi dimulai pada tanggal 17 April 2017 dan diakhiri pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan pembacaan akhir putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU peserta pemilu serentak tahun 2019.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat beberapa indikator keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu pada pemilu 2019 yakni: 1) Indikator Pelaksanaan Azas dan Prinsip penyelenggaraan pemilu secara konsekuen. 2) penyelenggara pemilu yang kredibel. 3) manajemen pemilu yang benar dan efektif. 4) pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. 5) pemilu yang damai dan tanpa anarki.

Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia No. 8 tahun 2019 pasal 30 yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota memiliki 12 tugas pokok yang harus dilaksanakan, satu diantaranya adalah memberikan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Melalui sosialisai ini, warga masyarakat diharapkan memiliki kepekaan untuk turut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu. Berdasarkan hasil dari penelitian dan hasil wawancara peneliti di lapangan sebagian masyarakat masih menyimpan keraguan akan pentingnya pemilu, adanya anggapan bahwa pemilu yang dilakukan selama ini tidaklah membawa perubahan bagi kehidupannya dan jauh dari harapan mereka. Maka dari itu, sosialisasi melalui lembaga KPU untuk menepis rasa pesimisme masyarakat di rasa perlu dan penting untuk dilakukan, agar rakyat mendapat pemahaman dan merubah sikapnya untuk lebih proaktif dalam memberikan hak suaranya.

KPU sangat berperan dalam memberikan sosialisasi politik sebagai tugas dan wewenangnya kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tidak hanya sekedar sosialisasi yang menyentuh pada aspek-aspek prosedur saja seperti mensosialisasikan tahapan kepemiluan dan teknis pemilu, akan tetapi juga juga mencakup aspek-aspek substantif seperti mensosialisasikan manfaat dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum dan juga membentuk pemilih-pemilih yang

berkompeten. KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi politik merujuk pada peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia No. 8 tahun 2019 yang menjadi sasaran bagi KPU ada sekitar sebelas segmen atau basic pemilih yakni:

1. Basic Keluarga
2. Basic Pemilih Pemula
3. Basic Pemilih Muda
4. Basic Pemilih Perempuan
5. Basic Penyandang Disabilitas
6. Basic Pemilih Berkebutuhan Khusus
7. Basic Kaum Marginal
8. Basic Komunitas
9. Basic Keagamaan
10. Basic Warga Internet
11. Basic Relawan Demokrasi

Kegiatan Sosialisasi oleh KPU Kota Tanjungpinang dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, dialog, permainan, dan juga perlombaan. Masyarakat yang menjadi sasaran diberi pemahaman mengenai pentingnya dilaksanakan pemilu, pentingnya pemilih berpartisipasi dalam pemilu, serta pentingnya pemilih pemula. Terkait dengan pentingnya dilaksanakan pemilu, melalui sosialisasi ini masyarakat diberi pemahaman bahwa pemilu adalah salah satu sarana untuk memilih sosok pemimpin yang dirasa pantas untuk dijadikan sebagai panutan.

Yang menjadi target utama dari KPU Kota Tanjungpinang adalah pada basic pemilih pemula yang dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi politik yang dilaksanakan KPU lebih banyak terjun langsung ke sekolah dan kampus yang ada di Tanjungpinang bahkan KPU juga membuat kegiatan seperti *Go class to class*.

Bagi pemilih pemula, sesuai aturan KPU No. 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri pemilu 2019, bahwa warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah sudah memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pemilu. Selain itu, umumnya pemilih pemula ini kebanyakan pelajar dan mahasiswa yang harus diberikan pemahaman terkait pentingnya terlibat dalam pemilu yang demokratis. Bukan tanpa alasan bahwa masa depan mereka ditentukan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan beriman. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan KPU oleh karena itu para pemilih pemula ini merupakan sasaran utama disebabkan mereka lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif.

Di samping itu, mereka diberi pemahaman bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu banyak kemungkinan yang akan terjadi termasuk *money politic* yang menjadi salah satu ancaman buruk bagi keberlangsungan pemerintahan. dalam hal sosialisasi yang dilakukan juga terkait mengenai tahapan pemilu mulai dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, tahapan daftar pemilih dan jenis data pemilih, tahapan kampanye pemilu yang menyampaikan visi-misi peserta pemilu guna meyakinkan para pemilih terkait program yang dimilikinya. Selain itu, disampaikan juga mengenai tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari pemungutan suara di TPS dan tata cara mencoblos, serta pemilih dan pemungutan suara pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti kepada beberapa narasumber mengenai kinerja KPU melalui sosialisasi politik yang dilaksanakan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih KPU Sebagai lembaga independen yang menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum pelaksanaan sosialisasi politik yang diberikan oleh KPU sudah menyentuh keberbagai kalangan masyarakat dalam memberikan sosialisasi terkait kepemiluan KPU tidak mendapatkan hambatan karena masyarakat yang di datangi untuk diberikan sosialisasi dan pendidikan politik menerima dengan baik ditambah lagi KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik dibantu oleh relawan demokrasi yang berjumlah 55 orang relawan demokrasi ini dibentuk oleh KPU Kota Tanjungpinang untuk membantu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sosialisasi Politik yang dilaksanakan oleh KPU telah menemui hasil yang memuaskan bagi masyarakat. sosialisasi telah diberikan namun, dalam hal pencapaian partisipasi pemilih pada pemilihan anggota legislative KPU Kota Tanjungpinang belum memenuhi target partisipasi dimana target partisipasi secara nasional yang harus dicapai adalah 77,5 %, sedangkan KPU Kota Tanjungpinang hanya mencapai 76,09 %. dari hasil penelitian peneliti menemukan beberapa alasan mengapa partisipasi pemilih di kota tanjungpinang pada pemilihan anggota legislative belum memenuhi target partisipasi secara nasional padahal sosialisasi politik telah diberikan kepada masyarakat yakni sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi memberikan suara pilihannya. Meski, sosialisasi telah diberikan.
2. Keadaan cuaca yang pada saat itu tidak mendukung seperti hujan, sehingga membuat masyarakat tidak datang untuk memilih.
3. Masyarakat yang bekerja diluar daerah.
4. Masyarakat yang tidak menerima formulir C 6 atau yang sering disebut oleh masyarakat formulir undangan. Masyarakat yang tidak menerima formulir C 6 ini merasa tidak diundang untuk memilih di TPS.
5. Masih ada masyarakat yang merasa sudah lelah dan tidak percaya lagi dengan beberapa anggota legislative yang mencalonkan dirinya dan merasa memilih atau tidak memilih kehidupan mereka begitu saja tidak ada perubahan.

Hal tersebutlah yang menjadi penyebab masih ada masyarakat yang tidak turut dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum. walau demikian KPU Kota Tanjungpinang akan terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih sehingga pada pemilu mendatang Kota Tanjungpinang memenuhi target secara nasional yakni 77,5%.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terwujudnya pemilihan umum yang demokratis tentunya tidak lepas dari lembaga pelaksana pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Melalui lembaga inilah kita akan mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemilu itu berjalan apakah baik ataupun tidak, melalui penelitian ini peneliti memiliki tujuan yakni ingin mengevaluasi kinerja KPU dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat yakni melalui sosialisasi politik yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat sesuai dengan misinya yaitu meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

KPU Kota Tanjungpinang dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik dibantu oleh Tim Relawan Demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU melalui seleksi Tim Relawan Demokrasi ini berjumlah 55 orang dan dibagi menjadi 11 kelompok sesuai dengan sasarannya yaitu: 1). Basis keluarga, 2). Basis pemilih pemula, 3). Basis pemilih muda, 4). Basis pemilih perempuan, 5). Basis penyandang disabilitas, 6). Basis pemilih berkebutuhan khusus, 7). Basis kaum marginal, 8). Basis komunitas, 9). Basis keagamaan, 10). Basis warga internet, dan 11). Basis relawan Demokrasi.

Melalui sosialisasi politik yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang dibantu dengan 55 orang Relawan Demokrasi Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang belum menemui hasil yang maksimal dimana jumlah partisipasi pemilih belum mencapai target secara Nasional sesuai dengan rencana strategis KPU RI yang harus mencapai 77,5%.

KPU Kota Tanjungpinang hanya mampu mencapai 76,09 % dari jumlah pemilih 151.072 yang telah ditetapkan dalam daftar pemilihan tetap yang turut berpartisipasi memilih adalah sekitar 116999. Meskipun demikian KPU sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam peningkatan partisipasi pemilih karena jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2014 capaian partisipasi pemilih pada pemilu legislative hanya mencapai 68% jika dibanding dengan pemilu

legislative di Tahun 2019 peningkatan partisipasi sudah mengalami peningkatan meskipun KPU belum memenuhi target.

V. Daftar Pustaka

Jurnal dan Buku

- Andrianus Pito, T. dkk. (2013). *Mengenal Teori-teori Politik*. Nuansa.
- Asuri, T. M. (2018). *Evaluasi Kinerja Pegara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Tahun 2017*. 19.
- Andrianus Pito, T. dkk. (2013). *Mengenal Teori-teori Politik*. Nuansa.
- Asuri, T. M. (2018). *Evaluasi Kinerja Pegara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Tahun 2017*. 19.
- Bonde, A., Jurnal, M. A. P., Publik, A., & No, V. (2017). *Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongodow dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017*. 1(2), 4.
- Budiardjo, M. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, H. (2016). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(3), 292. <https://doi.org/10.22146/jsp.13082>
- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja.
- Muhammad, A. S. (2018). *Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum (studi pada pemilihan umum tahun 2014 kota tanjungpinang)*. K-Media Yogyakarta.
- Ndraha, T. (1986). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Petrus Gleko, Agung Suprojo, A. W. L. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 38–47. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>
- Putri, N. A. D. (2017). *Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015*. 1(2), 176–177.
- Rofieq, A., & Nuryono, R. (2016). Pengaruh Klientilisme terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Kecamatan Sukatani pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2012. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 108. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6577>
- Saroinsong, R. J., Rondonuwu, A., Egeten, M., & Umum, K. P. (2018). *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado TAHUN 2016*. 1(1), 4.
- Sono, M. R. (2015). Evaluasi Kinerja Kpu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Kotamobagu Tahun 2014. *Jurnal Politico*, 1(7), 2.
- Sugiyono. (2015). *Metode Peneletian Manajemen*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Sulfitri Husain, Moh. Tabran Hi. Ambotuo, & Nurhayati Hamid. (2020). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Legislatif Tahun 2019. *Kinesik*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.22487/ejk.v7i1.49>

Undang-Undang

- Undang-undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 Pasal 30 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.